



**DR. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M.**

**FUD SYAIFUDDIN, S.T.**

---

**INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN  
PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2018**

Assalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

**A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keterangan pertanggungjawaban, dan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kepala Daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun, paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyusunan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas **Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018** sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya berguna sebagai bahan perbaikan program kerja dan peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah.

**A. DASAR HUKUM**

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara, Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

## **B. GAMBARAN UMUM DAERAH**

Kabupaten Sumbawa Barat atau yang lebih di kenal dengan nama KSB, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, merupakan pemekaran dari Kabupaten Sumbawa dan menetapkan wilayah Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah otonom dengan Ibu Kota Kabupaten di Taliwang.

### **1. Kondisi Geografis Daerah; Batas Adminstrasi Daerah, Luas Wilayah dan Topografi**

Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat yang terletak di sebelah barat Pulau Sumbawa, memiliki luas 1.849,02 KM<sup>2</sup> atau 21,77 % dari luas Kabupaten Sumbawa (Kabupaten Induk). Geografis Kabupaten Sumbawa Barat terletak diujung barat Pulau Sumbawa, pada posisi 116° 42" sampai dengan 118° 22' BT dan 8' sampai dengan 9°7' Lintang Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kecamatan Alas, dan Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa;
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur : Wilayah Alas Barat, Batu Lanteh dan Kecamatan Lunyuk/ Kecamatan Orong Telu Kabupaten Sumbawa;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Selat Alas

Pada awal pembentukannya, Kabupaten Sumbawa Barat terdiri dari 5 Kecamatan, 37 Desa dan 131 Dusun/Lingkungan. Sesuai dengan kebutuhan organisasi sekaligus untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, wilayah administrasi kabupaten Sumbawa Barat mengalami pemekaran menjadi 8 Kecamatan, 7 Kelurahan, 57 Desa dan

219 Dusun/ Lingkungan pada tahun 2011 dan sampai dengan akhir Desember Tahun 2015 menjadi 220 Dusun/lingkungan. Untuk tahun 2018, Data jumlah desa/kelurahan, dusun/lingkungan dan rukun tetangga tidak mengalami perubahan.

## **2. Gambaran Umum Demografis**

Jumlah Penduduk Kabupaten Sumbawa Barat sampai dengan tahun 2018 sebanyak 139.448 Jiwa, terdiri atas laki-laki sebanyak 69.024 Jiwa dan perempuan sebanyak 70.424 Jiwa.

## **3. Indeks Pembangunan Manusia**

Ipm diperlukan sebagai salah satu ukuran kinerja pembangunan di suatu daerah. IPM mencerminkan hasil pelaksanaan pembangunan manusia dalam 3 dimensi yaitu: umur panjang dan sehat, pengetahuan dan keterampilan, serta kehidupan yang layak. Setiap dimensi diukur dalam bentuk indikator berupa: indeks angka harapan hidup (ahh), indeks pendidikan, dan indeks pendapatan. Pembentukan indeks tersebut menggunakan standar yang ditetapkan *united national development program* (undp), sehingga dapat diperbandingkan ipm antar daerah. Dalam hal pembangunan daerah, ipm dijadikan sebagai salah satu ukuran utama pola dasar pembangunan daerah yakni menjadi kunci bagi terlaksananya perencanaan pembangunan daerah yaitu sebagai alat ukur pemantauan status pembangunan manusia, karena ipm sangat sensitive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi

Melalui perhitungan ipm metode baru, kabupaten sumbawa barat berada pada posisi tiga besar dalam hal keberhasilan pembangunan manusia di nusa tenggara barat selama 6 tahun terakhir yaitu 2012-2017. Angka ipm kabupaten sumbawa barat tahun 2017 mencapai angka 70,08 point yang mengalami peningkatan setiap tahunnya sejak 2011. Pada tahun 2017 seluruh komponen ipm kabupaten sumbawa barat mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun 2016. Komponen angka harapan hidup meningkat sebesar 0,32 tahun, komponen angka harapan lama sekolah meningkat sebesar 0,01 tahun, komponen rata-rata lama sekolah meningkat sebesar 0,13 tahun, dan pengeluaran per kapita disesuaikan naik sebesar 538 ribu per tahun. Di bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah kabupaten sumbawa barat mencapai 13,59 tahun. Angka ini mengandung makna bahwa dari seluruh penduduk kabupaten sumbawa barat berusia 7 tahun ke atas, mempunyai harapan lama sekolah 13 tahun 6 bulan. Angka ini setingkat semester 1 atau 2 pada perguruan tinggi. Di bidang ekonomi juga terjadi peningkatan pendapatan penduduk yang berdampak pada meningkatnya kesejahteraan. Hal itu dapat dilihat pada kenaikan rata-rata pengeluaran riil per kapita. Pada tahun 2016 rata-rata pengeluaran riil per kapita kabupaten sumbawa barat adalah sebesar Rp10,528 juta lebih per orang per tahun, kemudian meningkat menjadi Rp11,066 juta lebih per orang per tahun di tahun 2017.

Terkait angka kemiskinan di Kabupaten Sumbawa Barat pps telah merilis persentase kemiskinan, tingkat kemiskinan di kabupaten sumbawa barat tahun 2018 sebesar 14,17 persen. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1,79 persen jika dibandingkan dengan kondisi tahun

2017 sebesar 15,96 persen. Penurunan angka kemiskinan ini merupakan yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir.

## II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

### A. VISI DAN MISI

Visi daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 adalah *“terwujudnya pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berkeadilan menuju Kabupaten Sumbawa Barat sejahtera berlandaskan gotong-royong”*. Sedangkan Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan kepala daerah terpilih untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Oleh karena itu, ditetapkan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan responsif berlandaskan nilai-nilai agama, kearifan lokal, musyawarah mufakat dan gotong royong.
2. Mewujudkan kualitas hidup manusia dan masyarakat yang tinggi dan maju.
3. Mewujudkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pelayanan publik yang berkualitas dan bermanfaat.
4. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan bagi kelompok masyarakat miskin dan masyarakat rentan masalah sosial ekonomi.
5. Mewujudkan peningkatan daya saing menuju kemandirian ekonomi daerah yang berbasis ekologi dan lingkungan.
6. Mewujudkan industrialisasi sector unggulan komparatif dan unggulan kompetitif wilayah, inflasi yang terkendali, dan penciptaan kesempatan kerja bagi angkatan kerja yang menganggur.

### B. PRIORITAS DAERAH

Dalam menjabarkan dan mengimplementasikan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2016-2021 ke dalam pilihan program prioritas di masing-masing strategi yang tepat dan inheren, maka diperlukan kebijakan yang memenuhi minimal 4 (empat) perspektif, sebagai berikut:

1. Kebijakan umum pada perspektif masyarakat atau layanan, antara lain diarahkan kepada peningkatan pelibatan masyarakat dalam semua tahapan pembangunan, peningkatan penanganan keluhan public, peningkatan pemberdayaan gotong-royong, penyediaan modal usaha masyarakat, pembinaan koperasi dan UMKM, peningkatan sarana dan prasarana produksi bagi petani dan nelayan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama masyarakat, pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin dan masyarakat yang rentan terhadap masalah kesejahteraan sosial, peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung sosial ekonomi wilayah.
2. Kebijakan umum pada perspektif proses internal, antara lain diarahkan kepada sinkronisasi dan harmonisasi hubungan dan

regulasi antara provinsi dan kabupaten,perkuatan sistem pelayanan publik secara cepat, murah, transparandan terintegrasi, pemantapan kondusivitas wilayah; penerapan sistem pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan *on-line*; pengembangan kelembagaan non pemerintah yang independen guna penyelenggaraan mekanisme sistem pengaduan masyarakat, serta pengembangan demokratisasi dan wawasan kebangsaan masyarakat.

3. Kebijakan umum pada perspektif kelembagaan, antara lain diarahkan kepada pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan pola karier yang terbuka, serta penerapan sistem dan pemanfaatan teknologi informasi bagipeningkatan kinerja kelembagaan pemerintah daerah.
4. Kebijakan umum pada perspektif keuangan, antara lain diarahkan kepada penerapan *systemon-line* dalam penerimaan dan pengeluaran anggaran pemerintah guna penerapan transparansi untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelaksanaan politik anggaran secara efisien, efektif dan proporsional, serta peningkatan kapasitas keuangan daerah.

### **III. PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **A. RINGKASAN URUSAN KONKUREN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 11 ayat 3 dijelaskan bahwa urusan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah yang diselenggarakan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan yang berpedoman pada Pelayanan Dasar dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

#### **B. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR.**

##### **1. Urusan Pendidikan**

Capaian urusan pendidikan dapat dituangkan sebagai berikut:

- a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ditunjukkan pada jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak sebesar 5.459 orang sedangkan jumlah anak usia 4-6 tahun sebesar 9.040 orang sehingga capaiannya sebesar 60,39%
- b) Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara) sebesar 97,483 %
- c) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A ditunjukkan pada Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket A sebesar 16.292 sedangkan Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI/Paket sebesar 16.966 sehingga capaiannya 96,03 %
- d) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B ditunjukkan pada Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs/Paket B 5.077 sedangkan Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang

SMP/MTs/Paket B sebesar 7.340 sehingga capaiannya sebesar 69,79 %

- e) Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI di tunjukan pada Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SD/MI sebesar 1 orang sehingga capaiannya sebesar **0,01%**
- f) Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs di tunjukan pada Jumlah putus sekolah pd tingkat & jenjang SMP/MTs sebanyak 7 sehingga capaiannya sebesar 0,14%
- g) Angka Kelulusan (AL) SD/MI capaiannya sebesar 100 %
- h) Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs capaiannya sebesar 100 %
- i) Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs capaiannya 69,41 %
- j) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV capainnya sebesar 81,71 %

Alokasi Anggaran untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2018 mencapai Rp. 257.618.867.578. Dengan realisasi sebesar Rp. 217.653.691.477 Atau mencapai 84.49 %.  
(*data unaudited*).

## 2. Kesehatan

Capaian Kinerja urusan kesehatan pada tahun 2018 meliputi beberapa indikator kunci diantaranya:

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani capaiannya sebesar 96,30 %
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan capaiannya sebesar 80,9 %
- c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) capaiannya sebesar 96,9 %
- d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan yang di tujukan pada Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan capaiannya sebesar 100%
- e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA capaiannya sebesar 100%
- f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD capaiannya sebesar 100%
- g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin capaiannya sebesar 100 %
- h. Cakupan kunjungan bayi ditunjukan Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes.sesuai standar di satu wilayah kerja pd Kurun waktu tertentu sebesar 2.889sedangkan Jumlah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada Kurun waktu yang sama sebesar 2.915% sehingga capaiannya sebesar 99,1 %

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2018 mencapai Rp.149.691.461.634.00 dengan realisasi sebesar Rp.136.147.001.638.75 atau mencapai 90,95% (Data unaudited).

### 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:

1. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang ditunjukkan pada Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 181.687 km sedangkan Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut sebesar 338.690 km sehingga capaiannya sebesar 53,64 %
2. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik yang ditunjukkan pada Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik sebesar 3.959 Ha sedangkan Luas irigasi kabupaten sebesar 14.502,7 Ha sehingga capaiannya sebesar 27,29 %
3. Rumah Tangga Bersanitasi yang ditunjukkan pada Jumlah rumah tangga bersanitasi sebesar 30.335 sedangkan Jumla total rumah tangga sebesar 35.958 sehingga capaiannya sebesar 84,36 %
4. Kawasan Kumuh yang ditunjukkan pada Luas Kawasan Kumuh sebesar 85,92 sedangkan luas wilayah 184,902 sehingga capaiannya sebesar 84,36 %
5. Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ditunjukkan pada luas wilayah sebesar 184,902 sehingga capaiannya sebesar 68,28 %

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan pada *Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Permukiman* pada tahun 2018 mencapai Rp.293.178.275.889.00 dengan realisasi sebesar Rp.282.451.350.220.00 atau mencapai 88,78% (*data unaudited*).

### 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman.

a. Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman.

1. Rumah tangga pengguna air bersih yang ditunjukkan pada Jumlah rumah tangga pengguna air bersih sebesar 30.335 sedangkan Jumlah seluruh rumah tangga sebesar 35.958 sehingga capaiannya sebesar 84,36%
2. Lingkungan pemukiman kumuh yang ditunjukkan pada Luas lingkungan permukiman kumuh sebesar 85,92 sedangkan Luas wilayah sebesar 184,902 sehingga capaiannya sebesar 46,46 %
3. Rumah layak huni yang ditunjukkan pada Jumlah rumah layak huni sebesar 28,350 sedangkan Jumlah seluruh rumah di wilayah pemda sebanyak 37,589 sehingga capaiannya sebesar 75.42%

b. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.28.695.158.750.000, dengan realisasi mencapai sebesar Rp.28.489.624.828,- ( 99,28) ( Data unaudited).

### 5. Sosial

a. Indikator capaian kinerja urusan sosial adalah:

1. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi yang ditunjukkan pada jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dll yang terdapat di suatu daerah sebanyak 11 (Sebelas )
2. Persentase penyandang cacat, baik fisik dan mental serta lanjut usia yang tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

dalam satu tahun sebanyak 6.420 sehingga capaiannya sebesar 100 %

3. PMKS yg memperoleh bantuan social di tunjukan pada Jumlah PMKS yg diberikan bantuan sebesar 1.117 sedangkan Jumlah PMKS yg seharusnya menerima bantuan sebesar 3.869 sehingga capaiannya sebesar 29 %

Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp. 20,431,346,055.00 dengan realisasi sebesar Rp. 18,572,628,668.00 (90,90%) (data unaudited)

#### 6. Urusan Lingkungan Hidup

Adapun indikator capaian kinerja berdasarkan EKPPD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Penanganan sampah yg ditunjukan Volume sampah yang ditangani (m3) sebesar 111.71 sedangkan Volume produksi sampah (m3) sebesar 390.355 sehingga capaiannya sebesar 28,61%
- b. Kebersihan yg ditunjukan Jumlah pasar tradisional tergolong baik sebesar 7 sedangkan Jumlah seluruh pasar tradisional sebesar 390.355 sehingga capainnya sebesar 7 sehingga capaiannya sebesar 100%
- c. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk yg ditunjukan Jumlah daya tampung TPS (m3) sebesar 35,040 sedangkan Jumlah penduduk 139.448 sehingga capaiannya sebesar 256,49
- d. Penegakan hukum lingkungan yg ditunjukan capaiannya sebesar 100%

Alokasi anggaran untuk urusan ini sebesar Rp. 23,398,100,399.00- dengan realisasi sebesar Rp.21,584,842,105.00 atau 92,25%.(data unaudited)

#### 7. Kepemudaan & Olahraga

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga adalah sebagai berikut.

- a. Gelanggang / balai remaja yg ditunjukan Jumlah gelanggang/balai remaja di kabupaten sebanyak 5 buah sedangkan Jumlah penduduk sebanyak 139.448 sehingga capainnya sebesar 65.88%
- b. Lapangan olahraga yang ditunjukan Jumlah lapangan olahraga di kabupaten sebanyak 66 sedangkan Jumlah penduduk sebanyak 139.448 sehingga capainnya sebesar 0,473%

Alokasi anggran untuk penyelenggaraan urusan kesehatan pada tahun 2018 mencapai Rp.5.422.146.000.00 dengan realisasisebesar Rp.4.970.029.829.00 atau mencapai 91,66%.

#### 8. Penanaman Modal

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

- a. Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah ) capaiannya sebesar 385 %

Urusan penanaman modal terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan

urusan tersebut sebesar Rp.5,789,949,119.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,795,055,256.00 (82.82).

9. Koperasi & UKM

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan Koperasi & UKM adalah sebagai berikut.

- a. Koperasi aktif yg ditunjukkan Jumlah Koperasi aktif sebesar 374 sedangkan Jumlah seluruh koperasi sebanyak 374 sehingga capaiannya sebesar 100%
- b. Usaha Mikro dan Kecil yg ditunjukkan Jumlah usaha mikro dan kecil sebanyak 843 sedangkan Jumlah seluruh UKM sebanyak 843 sehingga capaiannya sebesar 100%

Urusan koperasi dan UKM terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.8.388.780.996 - dengan realisasi sebesar Rp.7.794.362.110(92.91%).

10. Kependudukan & pencatatan sipil

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan Kependudukan & pencatatan sipil adalah sebagai berikut.

- a. Kepemilikan KTP yang di tunjukan kepada Jumlah Penduduk yang memiliki KTP sebanyak 89,283 sedangkan Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau Pernah/sudah menikah) sebanyak 95,323 sehingga capaiannya sebesar **93,6 %**
  - b. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk yang di tunjukan kepada Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran sebesar 55,599 sedangkan Jumlah penduduk sebanyak 139,448 sehingga capaiannya sebesar 398,7%
  - c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK di tunjukannya sudah/belum dan hasilnya ternyata sudah adanya penerapan KTP
- Urusan kependudukan dan catatan sipil terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.6,184,346,232.00 dengan realisasi sebesar Rp.4,504,154,506.00 (82,65%).

11. Ketenagakerjaan

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut.

- a. Pelayanan kepesertaan jaminan social bagi pekerja/buruh yang di tunjukan kepada Jumlah pekerja/buruh peserta program Jamsostek aktif sebanyak 3.084 sedangkan Jumlah pekerja/buruh sebanyak 3.084 sehingga capaiannya sebesar 100%
- b. Pencari kerja yang ditempatkan yang di tunjukan kepada Jumlah pencari kerja yang ditempatkan sebanyak 411 sedangkan Jumlah pencari kerja yang mendaftar sebanyak 1.184 sehingga capaiannya sebesar 34,71 %

Urusan terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.5.612.905.523 dengan realisasi sebesar Rp. 5.048.221.723 (89,94%). BPKD KSB 2018 anaudited.

12. Ketahanan Pangan

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan Ketahanan Pangan adalah sebagai berikut.

- a. Belum ada Regulasi ketahanan pangan.
- b. Ketersediaan pangan utamayang ditunjukkan dengan Rata2 jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (kg) sebanyak 194.331 sedangkan Jumlah penduduk sebanyak 139.448 sehingga capaiannya sebesar 1,4 %

Alokasi anggaran untuk penyelenggara wajib bukan pelayanan dasar (Pangan) pada tahu 2018 Mencapai Rp. 10.531.573.442,- dengan realisasi Rp. 8.562.777.943,- atau mencapai 81,31%

13. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut.

- a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah yang ditunjukkan Pekerja perempuan di lembaga pemerintah sebanyak 1,673 sedangkan Jumlah pekerja perempuan sebanyak 70,424 sehingga capaiannya sebesar 2,37%
- b. Angka melek huruf perempuan usia 15th keatas capainnya sebesar 100%
- c. Partisipasi angkatan kerja perempuan capaiannya sebanyak 70,50%

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.3.661.823.257 dengan realisasi sebesar Rp.3.139.998.808 atau (85,75%)

14. Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan KB dan KS adalah sebagai berikut.

- a. Prevalensi peserta KB aktif capaiannya sebesar 100%
- b. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/ PKB) di setiap desa/kelurahan yang ditunjukkan dengan PLKB/PKB sebanyak 62 sedangkan Jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 64 sehingga capainnya sebesar 96,9 %

Urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.4.122.431.500 dengan realisasi sebesar Rp.3.349.846.278 atau (81,26%). data unaudited

15. Komunikasi Dan Informatika  
Adapun indikator capaian kinerja pelaksanaan urusan Komunikasi Dan Informatika adalah sebagai berikut.
- Web site milik pemerintah daerah di tunjukan ada [www.sumbawabaratkab.go.id](http://www.sumbawabaratkab.go.id)
  - Pameran/expo yang Menunjukkan Jumlah pameran/expo per tahun ada sebanyak 4 kali pameran  
Urusan komunikasi dan informatika terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp. 6,749,102,255.00 dengan realisasi sebesar Rp.6,092,146,762.00 (90,27%). data unaudited
16. Pertanahan  
Adapaun indikator kinerja urusan pertanahan adalah.
- Luas lahan bersertifikat di suatu daerah sebesar 838.494 ha sedangkan Luas lahan yang seharusnya bersertifikat di suatu daerah sebesar 5.961.941,35 ha sehingga capainya sebesar 14,0 %
  - Penyelesaian Kasus Tanah Negara capaiannya sebesar 100%
  - Penyelesaian Ijin Lokasi capaiannya sebesar 100%
17. Pemberdayaan Masyarakat & Desa  
Capaian kinerja pelayanan SKPD Berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) diuraikan sebagai berikut .
- PKK aktif yang menunjukan Jumlah PKK aktif sebanyak 64 sedangkan Jumlah PKK sebanyak 64 sehingga capainya sebesar 100%
  - Jumlah Posyandu Aktif yang menunjukan Jumlah Posyandu Aktif sebanyak 216 sedangkan Total Posyandu sebanyak 216 sehingga *Jumlah PKK menurut Kecamatan*

*Di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat*

No.	Kecamatan	PKK			Keterangan
		Jumlah	Aktif	Persentase PKK Aktif (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sekongkang	7	7	100	-
2.	Maluk	5	5	100	-
3.	Jereweh	4	4	100	-
4.	Taliwang	15	15	100	-
5.	Brang Ene	6	6	100	-
6.	Brang Rea	9	9	100	-
7.	Seteluk	10	10	100	-
8.	Poto Tano	8	8	100	-
Total		64	64	100	-

Jumlah Posyandu menurut Kecamatan  
di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat

No.	Kecamatan	Posyandu Tahun 2016			Jumlah Kader Posyandu (Orang)
		Jumlah Posyandu	Posyandu Aktif	Persentase Posyandu Aktif (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sekongkang	18	18	100	90
2.	Maluk	15	15	100	75
3.	Jereweh	18	18	100	90
4.	Taliwang	64	64	100	320
5.	Brang Ene	9	9	100	45
6.	Brang Rea	31	31	100	155
7.	Seteluk	35	35	100	175
8.	Poto Tano	20	20	100	100
Total		210	210	100	1.050

Pada tahun anggaran 2018, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.18,353,810,184.00 dengan realisasi mencapai Rp. 16,805,575,395.00 atau sebesar 91.56 (data unaudited)

18. Kebudayaan

Adapun indikator penyelenggaraan urusan kebudayaan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

- a. Penyelenggaraan festival seni dan budaya yang menunjukkan Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya sebanyak 8 kali
- b. Sarana penyelenggaraan seni dan budaya yang menunjukkan Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya sebanyak 7 (Tujuh) sarana
- c. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan yang menunjukkan Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan sebanyak 3 sedangkan Total Benda, situs & kawasan yang dimiliki daerah sebanyak 3 sehingga capaiannya sebesar 100%

19. Statistik

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

No	Indikator Kinerja	Persentase /realisasi Capaian Kinerja	Keterangan
1	Buku "kabupaten dalam angka"	<b>Ada</b>	-
2	Buku "PDRB kabupaten"	<b>Ada</b>	-

20. Kearsipan

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

- a. Penerapan pengelolaan arsip secara baku yang menunjukkan Jumlah SKPD yang telah menerapkan arsip secara baku sebanyak 5 sehingga Jumlah SKPD sebanyak 39 sehingga capaiannya sebesar 12,8 %
- b. Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang Menunjukkan jumlah Kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 2 kegiatan

Urusan kearsipan terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.5.005.998.907- dengan realisasi sebesar Rp.4.587.763.457- (91,65%). ( *Laporan Keuangan anaudited*)

21. Perpustakaan

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

- a. Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah yang menunjukkan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11.780 sedangkan Jumlah koleksi judul buku yg tersedia di perpustakaan daerah sebanyak 11.780 sehingga capainnya sebesar 100%
- b. Pengunjung perpustakaan yang menunjukkan Jumlah kunjungan ke perpustakaan selama 1 tahun sebanyak 3.902 sedangkan Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani sebesar 125.483 sehingga capaiannya 31,1 %

C. URUSAN PILIHAN

1. Kelautan dan Perikanan

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

No	Indikator Kinerja	Persentase /realisasi Capaian Kinerja	Keterangan
1	Produksi perikanan	<b>82,5 %</b>	-
2	Konsumsi ikan	<b>100%</b>	-

Alakasi Anggaran untuk penyelenggara Urusan kelautan Perikanan dan Peternakan pada tahun 2018 mencapai Rp. 13,885,541,124.00,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 13,002,632,985.00,- atau mencapai 93.26.( Data Unaudited)

## 2. Pertanian

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

No	Indikator Kinerja	rumusan	Persentase /realisasi Capaian Kinerja
1	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ton) ----- Luas areal tanaman padi/bahan pangan utama lokal lainnya (ha)	156.902 ton ----- 28.041 ha =53,78%
2	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{921,278.8}{24,059,472.7} \times 100\%$	<b>3,82%</b>

Urusan pertanian terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.49,336,972,010.00,- dengan realisasi sebesar Rp.45,613,248,601.00-(92.45). data unaudited

## 3. Parwisata

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

No	Indikator Kinerja	Persentase /realisasi Capaian Kinerja	Keterangan
1	Kunjungan wisata	5.285 orang	
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Tahun 2017**)	$\frac{441,162,40}{24,059,472.} \times 100\%$	1,83%

Urusan pariwisata terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.11.404.316.530 dengan realisasi sebesar Rp.10.616.312.174(93,09%). Data unaudited

#### 4. Industri

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

No	Indikator Kinerja	Persentase /realisasi Capaian Kinerja	Keterangan
1	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB Tahun 2018**)	55,465.7 ----- x 100% 24,059,472.7	<b>0,23%</b>
2	Pertumbuhan Industri	843 – 100 ----- x 100% 100	<b>74,3%</b>

Urusan industri terselenggara dengan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan urusan tersebut sebesar Rp.7.836.283.000,- dengan realisasi sebesar Rp.7.777.556.124,-(99,25%). Data unaudited.

#### 5. Perdagangan

Adapun indikator penyelenggaraan urusan berdasarkan indikator kinerja kunci adalah:

No	Indikator Kinerja	Persentase /realisasi Capaian Kinerja	Keterangan
	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2017**)	362,041.5 ----- x 100% 24,059,472.7	<b>1,50%</b>
	Ekspor Bersih Perdagangan	<b>US\$ 0,-</b>	

Urusan perdagangan terselenggara dengan alokasi anggaran mencapai Rp.6.538.980.650 dengan realisasi sebesar Rp.5.996.194.688 atau mencapai 91,70%. Data Unaudited

### IV. TUGAS PEMBANTUAN

#### A. Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan dan sasaran dari Pelaporan Dana Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Daerah khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Mengefektifkan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam mengawal pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.
3. Mengoptimalkan Pengadministrasian, Pelaporan, Koordinasi ,Monitoring, Evaluasi dan Perumusan Kebijakan Penyelenggaraan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Mengendalikan dilakukan dan menjamin pelaksanaan rencana pembangunan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan.
5. Mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan dengan mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau yang akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

#### B. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Pada tahun 2018, terdapat 2 (kementerian) Kementerian pemberi tugas pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Kementerian tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Kementerian Pertanian;
- b. Kementerian Dalam Negeri

#### C. Program dan Kegiatan

##### Perkembangan Realisasi Tugas Pembantuan

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		Sisa Anggaran (Rp.)	KET
			Rp.	%		
1	<b>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana</b>	<b>4,190,010,000</b>	<b>3,971,605,000</b>	<b>94.79</b>	<b>218,405,000</b>	
	Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1,425,000,000	1,403,577,000	98.50	21,423,000	
	<i>Jaringan Irigasi Tersier (Base Line)</i>	<i>960,000,000</i>	<i>960,000,000</i>	<i>100.00</i>	-	
	<i>Pengembangan Sumber Air (Base Line)</i>	<i>105,000,000</i>	<i>83,577,000</i>	<i>79.60</i>	<i>21,423,000</i>	
	<i>Pembangunan Embung Pertanian</i>	<i>360,000,000</i>	<i>360,000,000</i>	<i>100.00</i>	-	
	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	2,254,000,000	2,214,815,000	98.26	39,185,000	
	Alat dan Mesin Pra Panen	2,219,000,000	2,190,465,000			
	<i>Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Pangan</i>	<i>2,071,000,000</i>	<i>2,042,965,000</i>	<i>98.65</i>	<i>28,035,000</i>	
	<i>Alat dan Mesin Pertanian Pra Panen Sub Sektor Hortikultura</i>	<i>148,000,000</i>	<i>147,500,000</i>	<i>99.66</i>	<i>500,000</i>	
	Fasilitasi Teknis dan Dukungan Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin	35,000,000	24,350,000	69.57	10,650,000	

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		Sisa Anggaran (Rp.)	KET
			Rp.	%		
	<i>Layanan Operasional Mendukung Penyediaan Alsintan</i>	35,000,000	24,350,000	69.57	10,650,000	
	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Prasarana dan Saran Prasarana	319,760,000	240,327,000	75.16	79,433,000	
	<i>Operasional Dukungan Kegiatan Lingkup PSP</i>	182,960,000	103,527,000	56.58	79,433,000	
	<i>Pembinaan dan Pendampingan Kegiatan Mendukung UPSUS</i>	136,800,000	136,800,000	100.00	-	
	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida	101,400,000	79,976,000	78.87	21,424,000	
	<i>Fasilitasi Penyaliran Pupuk Bersubsidi menggunakan Kartu Tani</i>	101,400,000	79,976,000	78.87	21,424,000	
	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian	89,850,000	32,910,000	36.63	56,940,000	
	<i>Pembinaan , Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi Keuangan</i>	54,850,000	22,490,000	41.00	32,360,000	
	<i>Layanan Operasional Mendukung Kegiatan Asuransi</i>	35,000,000	10,420,000	29.77	24,580,000	

2. Sumber: Bappeda dan Litbang 2019

Tabel 5.2  
Perkembangan Realisasi Urusan Bersama

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)	KET.
			Rp.	%		
1	Generasi Sehat Cerdas	200,100,000	188,899,000	94.40	11,201,000	
	<i>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</i>	58,770,000	51480000	87.60		
	<i>Belanja Bahan</i>	9,580,000	9,080,000	94.78	500,000	
	<i>Belanja Honor Output Kegiatan</i>	7,370,000	7,370,000	100.00	-	
	<i>Belanja Barang Non Operasional</i>	47,000,000	47,000,000	100.00	-	
	<i>Belanja Barang Persediaan Konsumsi</i>	4,500,000	4,500,000	100.00	-	
	<i>Belanja Sewa</i>			100.00		

NO	PROGRAM/KEGIATAN/PEKERJAAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI		SISA ANGGARAN (Rp.)	KET.
			Rp.	%		
		10,800,000	10,800,000		-	
	<i>Belanja Jasa Profesi</i>	4,600,000	4,600,000	100.00	-	
	<i>Belanja Jasa Lainnya</i>	18,000,000	18,000,000	100.00	-	
	<i>Belanja Perjalanan Biasa</i>	20,630,000	17,219,000	83.47	3,411,000	
	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	18,850,000	18,850,000	100.00	-	

3. Sumber: Bappeda dan Litbang 2019

#### **A. Sumber Jumlah Anggaran**

Kabupaten Sumbawa Barat untuk Tahun Anggaran 2018 memperoleh Dana Tugas Pembantuan dari pusat sebesar Rp14,824,030,000 dengan realisasi sebesar 14,129,630,000 atau 95% dan Urusan Bersama sebesar Rp.400,200,000 dengan realisasi 377,798,000 atau 94%

#### **B. SKPD Yang Melaksanakan Tugas Pembantuan**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pelaksana program dan kegiatan tugas pembantuan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

### **V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN**

#### **A. PEMBINAAN BATAS WILAYAH**

##### **1. Kebijakan dan Kegiatan**

###### **a. Batas Wilayah antar Kabupaten**

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018 yang telah dituangkan ke dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2018 dan telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2018, melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum telah menetapkan program penataan daerah otonomi baru. Salah satu dari kegiatan di dalam program tersebut adalah Fasilitasi Percepatan Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi Batas Daerah. Batas daerah yang dimaksud adalah batas wilayah administrasi antara Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.

###### **b. Batas Wilayah antar Kecamatan**

Penyelesaian batas wilayah antar kecamatan di wilayah administrasi Kabupaten Sumbawa Barat diupayakan melalui Program Penataan Daerah Otonomi Baru melalui

kegiatan Pelacakan dan Penentuan Tapal Batas Daerah antar Kecamatan/Kelurahan.

## **2. Realisasi Pelaksanaan Kebijakan dan Kegiatan**

### **a. Batas wilayah antar Kabupaten**

Sampai dengan akhir tahun 2018, kegiatan fasilitasi penyelesaian tapal batas wilayah administrasi antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa masih terfokus pada koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Dalam Negeri. Dalam hal ini, keputusan atau penetapan mengenai kejelasan batas daerah antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten Sumbawa belum dapat terealisasi. Oleh karena itu, pada tahun 2016 Kementerian Dalam Negeri telah menerjunkan Tim kelengkapan untuk melakukan peninjauan titik koordinat batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa. Terkait dengan adanya perubahan komposisi di tingkat Kementerian Dalam Negeri termasuk Tim Penentuan Titik Koordinat batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat, maka akan ada peninjauan ulang oleh Tim Kemendagri terkait batas wilayah kedua daerah tersebut.

### **b. Pelacakan Batas Kecamatan**

Batas wilayah antar Kecamatan Kegiatan pelacakan dan penentuan batas wilayah administrasi kecamatan dari tahun 2016 udah ada Kecamatan yang sudah ditetapkan batas wilayahnya dengan pemasangan Pal batas antar kecamatan.

Pelacakan dan Penentuan Tapal Batas Daerah Antar Kecamatan, Desa/Kelurahan Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Difokuskan untuk melakukan inventarisasi dasar hukum dalam menetapkan batas wilayah serta mengumpulkan semua dokumen dan data tentang batas wilayah masing-masing kecamatan dan pemasangan pal batas pada kecamatan yang telah ditetapkan batas wilayahnya melalui Keputusan Bupati. Panitia pelacakan juga melakukan identifikasi segala permasalahan yang timbul yang akibat penentuan batas wilayah tersebut. Untuk itu dilakukan sosialisasi ke semua Kecamatan tentang bagaimana sistem dan mekanisme pelacakan dan Penentuan tapal batas sehingga antara daerah-daerah yang memiliki permasalahan tapal batas dapat bersama-sama menyusun standar dan rencana penyelesaian untuk tahun yang akan datang.

Pelacakan Tapal Batas Daerah Antar Kecamatan dititik beratkan dalam penyelesaian tapal batas antara Kecamatan Taliwang dan Kecamatan lainnya. Dari tahun 2016 tapal batas Kecamatan yang telah dilakukan pelacakan batas

meliputi tiga batas Kecamatan yaitu Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Jereweh, Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Brang Rea serta Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk. Untuk Pemasangan Pal Batas yaitu antara Kecamatan Maluk dan Kecamatan Sekongkang dan Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Ene.

Adapun desa-desa yang berbatasan antara kedua kecamatan adalah sebagai berikut:

- Desa/Kelurahan di Kecamatan Taliwang yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Seteluk adalah Kelurahan Sampir, Desa Batu Putih dan Desa Seloto.
- Desa di Kecamatan Seteluk yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Taliwang adalah Desa Kelanir, Desa Rempe, Desa Desaloka, Desa Seran dan Desa Meraran.
- Desa/Kelurahan di Kecamatan Taliwang yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Brang Rea adalah Kelurahan Sampir, Desa Tamekan dan Desa Seloto.
- Desa di Kecamatan Brang Rea yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Taliwang adalah Desa Sapugara Bree, Desa Beru, Desa tepas, Desa Tepas Sepakat, Desa Moteng, Desa Rarak Ronges, Desa Bakat Monteh.
- Desa/Kelurahan di Kecamatan Taliwang yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Jereweh adalah Desa Labuan Lalar dan Desa Lalar Liang
- Desa di Kecamatan Jereweh yang berada di perbatasan dengan Kecamatan Taliwang adalah Desa Dasan Anyar dan Desa Beru

Adapun titik batas antara Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Seteluk adalah sebagai berikut:

- Kelurahan Sampir di Kecamatan Taliwang, berbatasan dengan Desa Meraran di Kecamatan Seteluk dengan titik batas berada di Tugu Batas yg terletak di Sekitar Danau Lebo Taliwang.
- Desa Batu Putih di Kecamatan Taliwang berbatasan dengan Desa Kelanir di Kecamatan Seteluk dengan titik batas berada pada Jembatan dan mengikuti sungai sebagai batas alam.
- Desa Seloto Kecamatan Taliwang berbatasan dengan Desa Seran Kecamatan Seteluk dengan titik batas berada di sampar Sok dan Jorok Liang.
- Desa Seloto Kecamatan Taliwang berbatasan dengan Desa Rempe Kecamatan Seteluk dengan titik batas berada di Kokar Ai' Sangir.
- Desa Seloto Kecamatan Taliwang berbatasan dengan Desa Desaloka Kecamatan Seteluk dengan titik batas berada di Danau Lebo tepatnya di Bukit Bara Batu.

Adapun titik batas antara Kecamatan Taliwang dan Kecamatan Brang Rea adalah sebagai berikut :

- Desa Seloto Kecamatan Taliwang berbatasan dengan Desa Tepas, Desa Tepas Sepakat, Desa Beru, Desa rarak Ronges, Desa Bakat Monteh dengan mengambil garis batas alami sepanjang punggung bukit.
- Desa Tamekan Kecamatan Taliwang berbatasan dengan Sapugara Bree dengan titik batas di bukit

### **3. Sengketa/Permasalahan Batas Wilayah**

#### **a. Batas wilayah antar Kabupaten**

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengesahkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten definitif di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 298 Tahun 2009 tentang Penegasan Batas Wilayah administrasi Pemerintahan antara Kabupaten Sumbawa dengan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan terakhir Permendagri Nomor 123 Tahun 2017 ternyata belum bisa memberikan kejelasan dan kepastian akan Batas wilayah antara Kabupaten Sumbawa Barat dengan Kabupaten induk yaitu Kabupaten Sumbawa. Hal tersebut menjadi permasalahan dalam penegasan batas wilayah administrasi kedua Kabupaten yang berdampak pada ketidakjelasan kewenangan dalam pemberian ijin dan data yuridis atas tanah-tanah tertentu yang terletak pada wilayah yang dipermasalahkan.

#### **b. Batas wilayah antar Kecamatan**

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan pelacakan dan penentuan batas daerah antar Kecamatan pada tahun 2016 sudah terlaksana sepenuhnya namun masih terkendala dipenetapan batas wilayah administrasi dimasing-masing Kecamatan karena kesepakatan dari desa-desa yang berbatasan diantaranya Desa meraran dengan Keurahan Sampir sehingga Pal Batas antara Kecamatan Taliwang dengan seteluk belum bisa diputuskan.

### **4. Solusi yang Dilakukan dan Tingkatan Penyelesaian Batas Wilayah antar Kabupaten**

Sebagai proses penyelesaian permasalahan batas wilayah antar kabupaten tersebut, Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pihak yang menjadi mediator dalam penyelesaian masalah tapal batas dua Kabupaten dengan tetap menegaskan bukti/dokumen autentik yang menunjukkan bagian wilayah yang dipermasalahkan merupakan daerah wilayah Kabupaten Sumbawa Barat .

## **B. PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA**

### **1. Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya**

Adapun uraian bencana yang terjadi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Bencana yang Terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2018 yang dampaknya cukup signifikan

NO	WAKTU	LOKASI KEJADIAN			AKIBAT	TINDAK LANJUT
		JENIS KEJADIAN	KECAMATAN	DESA/KEL		
1	08-01-2018	Banjir	BrangRea	Seminar Salid	Air menggenangi pemukiman warga dengan ketinggian 20 s/d 120 cm dan akses jalan ke desa tersebut terputus	-Satgas RC turun kelokasi mendata dampak banjir
2	12-01-2018	Tanah Longsor Poto Batu	Taliwang	Kel. Telaga Bertong	Tanah longsor dan pohon tumbang memutus akses jalan taliwang-jereweh	sudah ditangani oleh satgas TRC beserta masyarakat setempat dan arus lalu lintas normal kembali.
3	04-04-2018	Banjir Bandang	Poto Tano	Desa Koar Lian	Air menerjang pemukiman penduduk dan perkebuan	Satgas RC melakukan pembersihan areal jalan raya dari lumpur dan tanah yang menghalangi jalan
4	29-07-2018	Gempa Bumi	Seluruh Wil.KSB	Seluruh Wil.KSB	Beberapa rumah warga rusak ringan,dan berat	Satgas RC monitoring dan pengecekan kelokasi
5	05-08-2018	Gempa Bumi	Seluruh Wil.KSB	Seluruh Wil.KSB	Beberapa rumah warga rusak	Satgas RC monitoring dan pengecekan kelokasi
6	09-082018	Gempa Bumi	Seluruh Wil.KSB	Seluruh Wil.KSB	Beberapa rumah warga rusak	Satgas RC monitoring dan pengecekan kelokasi
7	19-08-2018	Gempa Bumi	Brang Rea	Seluruh Wil.KSB	Seluruh Wil.KSB	Beberapa rumah warga rusak
8	06-11-2018	Longsor dan pohon tumbang	Sekongkang	Jalan Raya Sekongkang Talonag	Tanah longsor dan pohon tumbang memutus akses jalan raya Sekongkang Talonang	Satgas RC turun ke lokasi melakukan pembersihan

NO	WAKTU	LOKASI KEJADIAN			AKIBAT	TINDAK LANJUT
		JENIS KEJADIAN	KECAMATAN	DESA/KEL		
9	08-11-2018	Longsor dan pohon tumbang	Sekongkang	Jalan Raya Sekongkang Talonang	Tanah longsor dan pohon tumbang memutus akses jalan raya Sekongkang	Satgas RC turun ke lokasi melakukan pembersihan
10	15-11-2018	Longsor dan pohon tumbang	Sekongkang	Jalan Raya Sekongkang Talonag	Tanah longsor dan pohon tumbang memutus akses jalan raya Sekongkang Talonang	Satgas RC turun ke lokasi melakukan pembersihan
11	22-11-2018	Banjir Bandang	Taliwang	Kertasari	Beberapa rumah warga terendam banjir	telah dilakukan pemantauan kelokasi
12	06-12-2018	Banjir Bandang, Tanah longsor	Sekongkang	Desa Tongo	Rumah warga terendam banjir, tanah longsor dan pohon tumbang menutup akses jalan telonang	telah dilakukan pemantauan kelokasi kegiatan

Penanggulangan bencana tersebut dilakukan oleh Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa Barat bersama masyarakat di lokasi bencana dalam proses pemantauan, identifikasi dan pembersihan material yang terkena bencana.

## 2. Status Bencana

Bencana yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat selama tahun 2018 termasuk dalam kategori status Bencana skala kecil, sehingga penanganannya hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah setempat.

## 3. Sumber dan Jumlah Anggaran

Penanggulangan bencana yang dilakukan menggunakan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggaran untuk program pencegahan dini dan penanggulangan bencana alam sebesar Rp.5,553,407,000,- dengan realisasi sebesar 5,280,523,558,- atau mencapai 95,09%

## C. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Jumlah pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan sebanyak 49 kasus, dan semuanya sudah ditangani baik melalui pro yustisi maupun preventif non yustisi. Peraturan yang dilanggar diantaranya Perda Nomor 2 Tahun 2015 tentang pemberantasan prostitusi dan minuman beralkohol, Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan Perbup Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Disiplin Aparatur.

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Trantibum

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menjadi leading sector penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada tahun 2018 adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa Barat.

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yakni pada Satuan Polisi Pamong Praja bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun Anggaran 2018. Alokasi anggarannya sebesar Rp.4,547,200,000,-dengan realisasi sebesar Rp.4,434,043,097,- atau mencapai 97,51%

#### VI. PENUTUP.

Demikian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini disusun sebagai bantuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah kepada masyarakat sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian LPPD kepada masyarakat, LKPJ kepada DPRD dan ILPPD kepada masyarakat. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Daerah .

Taliwang, Mei 2019

WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT,

FUD SYAIFUDDIN,S.T.